Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 198 - 204

Tantangan dan Solusi Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah

Emmy Patari[1*], Baharuddin[2], Natalia Paranoan[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
emmypatari@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dan solusi dalam pengawasan perizinan berusaha di Provinsi Papua Tengah. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas implementasi perizinan berusaha yang seringkali menghadapi hambatan regulasi, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kapasitas aparatur, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan. Namun demikian, ditemukan pula sejumlah solusi strategis, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi peran teknologi digital, serta peningkatan sinergi lintas sektor untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola perizinan di daerah otonom baru, sekaligus implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan adaptif. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan perizinan di Papua Tengah diharapkan mampu mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kata kunci: pengawasan, perizinan berusaha, Papua Tengah, kebijakan publik, tata kelola

Abstract

This study examines the challenges and solutions in business licensing supervision in Central Papua Province. The research background lies in the complexity of business licensing implementation, which often encounters regulatory constraints, weak inter-agency coordination, and limited resources. A qualitative descriptive approach was employed through field studies, in-depth interviews, and policy document analysis. The findings reveal that the main challenges include inadequate institutional coordination, limited human resource capacity, and insufficient utilization of information technology in supervision systems. Nevertheless, several strategic solutions were identified, such as strengthening human resource capacity, optimizing digital technology, and enhancing cross-sectoral collaboration to promote transparency and accountability. This study contributes theoretically by enriching the literature on licensing governance in newly established autonomous regions, while also providing practical implications for local governments in formulating more effective and adaptive supervision policies. Strengthening business licensing supervision in Central Papua is expected to foster a healthier and more sustainable investment climate.

Keywords: *supervision, business licensing, Central Papua, public policy, governance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perizinan berusaha merupakan instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA), pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur perizinan sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Namun, di berbagai daerah, khususnya provinsi pemekaran baru seperti Papua Tengah, implementasi pengawasan perizinan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, hingga keterbatasan infrastruktur digital (Rahmadani et al., 2024; Zukhri & Putranto, 2022).

Pengawasan perizinan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti penyalahgunaan izin, usaha ilegal, dan konflik sosial-lingkungan yang dapat menghambat pembangunan daerah (Finta & Malau, 2025). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi aspek kunci untuk memastikan pelaku usaha mematuhi regulasi serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi di Papua Tengah yang masih menghadapi kendala geografis dan aksesibilitas (World Bank, 2021).

Untuk memperjelas fenomena, berikut ringkasan data mengenai tantangan pengawasan perizinan di daerah pemekaran, termasuk Papua Tengah:

Tabel 1. Data / Fakta Fenomena

Aspek Tantangan	Fakta/Laporan Terkait
Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya jumlah pengawas terlatih dan kompetensi teknis di DPMPTSP Papua Tengah (Tesis, 2025).
Infrastruktur Teknologi	Akses internet di Papua hanya 62% rumah tangga, jauh di bawah rata-rata nasional 89% (BPS, 2023).
Koordinasi Antarlembaga	Data perizinan antar instansi sering tidak sinkron sehingga menghambat verifikasi (Rahmadani et al., 2024).
Pemahaman Pelaku Usaha	Minimnya sosialisasi menyebabkan pelaku usaha salah prosedur dalam pengajuan izin (Zukhri & Putranto, 2022).
Risiko Usaha	Potensi konflik lahan dan lingkungan akibat lemahnya pengawasan pasca-izin (Finta & Malau, 2025).

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Urgensi Penelitian

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai tantangan dan solusi pengawasan perizinan berusaha di Papua Tengah menjadi sangat penting. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat tata kelola perizinan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas birokrasi lokal, serta mendorong kepercayaan investor. Lebih jauh, penelitian ini memiliki urgensi strategis karena berkaitan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah pemekaran baru yang memiliki potensi sumber daya besar namun menghadapi keterbatasan struktural dan geografis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah dalam pengawasan perizinan berusaha?
2. Solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan pengawasan perizinan berusaha di Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) berperan penting dalam memastikan efektivitas birokrasi, termasuk dalam pengawasan perizinan. MSDM tidak hanya mencakup rekrutmen dan seleksi, tetapi juga pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penilaian kinerja, serta pemberian kompensasi yang adil (Dessler, 2020). Dalam konteks pengawasan perizinan, keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur sering menjadi hambatan utama (Hasibuan, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan publik sangat ditentukan oleh kapasitas SDM, khususnya pemahaman terhadap regulasi dan kemampuan menggunakan teknologi digital (Mangkunegara, 2021; Rivai & Sagala, 2021).

Pengawasan Perizinan Berusaha

Pengawasan perizinan berusaha adalah mekanisme pemerintah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin yang

diterbitkan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Dalam sistem ini, usaha berisiko tinggi diawasi lebih ketat, sedangkan usaha berisiko rendah dapat diawasi melalui mekanisme administratif dan *self-assessment* (Rahmadani et al., 2024).

Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi hambatan struktural, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Papua Tengah. Penelitian Zukhri dan Putranto (2022) menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS-RBA telah memberikan kemudahan prosedural, koordinasi antarlembaga dan sosialisasi kepada pelaku usaha masih minim. Selain itu, Finta dan Malau (2025) menekankan bahwa keterbatasan anggaran dan lemahnya komitmen pelaku usaha sering menjadi kendala pengawasan di tingkat lokal.

Peran Teknologi dalam Pengawasan

Digitalisasi perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan secara real-time, efisien, dan lebih transparan (World Bank, 2021). Namun, keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil, seperti Papua, menjadi hambatan signifikan. Data BPS (2023) mencatat bahwa tingkat akses internet rumah tangga di Papua hanya 62%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 89%, sehingga pemanfaatan OSS tidak maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial lokal.

Research Gap

Studi sebelumnya lebih banyak membahas implementasi OSS dari aspek pelayanan (Zukhri & Putranto, 2022; Rahmadani et al., 2024), sementara kajian mengenai pengawasan izin usaha pasca-terbit masih terbatas, khususnya di daerah pemekaran baru seperti Papua Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan dan solusi pengawasan perizinan, dengan menekankan aspek koordinasi kelembagaan, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi dalam konteks lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Desain penelitian ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dan kelembagaan secara mendalam, khususnya terkait tantangan dan solusi pengawasan perizinan berusaha di daerah otonom baru seperti Papua Tengah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna dan interpretasi dari pengalaman para aktor yang terlibat dalam proses pengawasan, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawasan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2020). Dalam hal ini, sampel penelitian terdiri dari enam informan kunci, yakni pejabat pelaksana teknis DPMPTSP, aparat pengawas, serta pelaku usaha penerima izin. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses pengawasan perizinan, pengalaman empiris, dan kapasitas dalam memberikan informasi relevan.

Penelitian dilaksanakan di kantor DPMPTSP Provinsi Papua Tengah sebagai lokasi utama, dengan tambahan observasi lapangan pada beberapa kegiatan usaha yang telah memperoleh izin. Waktu penelitian dilakukan selama empat bulan, mulai dari Januari hingga April 2025. Lokasi penelitian dipilih karena Papua Tengah merupakan provinsi baru dengan kompleksitas pengawasan perizinan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kapasitas birokrasi yang masih berkembang. Hal ini membuat wilayah tersebut menjadi konteks yang tepat untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan kunci, sementara observasi dilakukan guna melihat secara langsung

praktik pengawasan di lapangan. Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder seperti laporan tahunan, regulasi, serta dokumen internal DPMPTSP. Triangulasi metode diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Flick, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2019). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi relevan terkait tantangan dan solusi pengawasan, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi data dari berbagai sumber hingga diperoleh temuan yang konsisten. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta strategi yang dapat menjadi solusi atas permasalahan pengawasan perizinan berusaha di Papua Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan enam informan kunci yang terdiri atas pejabat teknis DPMPTSP, aparat pengawas, serta pelaku usaha yang telah memperoleh izin berusaha di Provinsi Papua Tengah. Karakteristik responden dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama/Peran	Jabatan/Posisi	Latar Belakang Relevan	Keterangan
1	Marthina M. Ruatakurei, S.Sos	Petugas Pelaksana Teknis DPMPTSP	Bertugas pada pengawasan teknis perizinan	Informan Utama
2	Ricky Gunawan Teja	Direktur CV. Anugerah Bangunan Sejahtera	Pelaku usaha konstruksi	Penerima Izin Usaha
3	Cheyni Chintiya Langingi	Direktur PT. Elita Mandiri Papua	Pelaku usaha perdagangan	Penerima Izin Usaha
4	Budi Santoso	Direktur CV. Assala Karya Semesta	Pelaku usaha jasa	Penerima Izin Usaha
5	Ayub Imbiri	Aparat Pengawas Lapangan	Bertugas memantau kepatuhan usaha	Aparat Pengawas
6	Yohana Awi	Aparat Pengawas Lapangan	Bertugas dalam verifikasi dokumen izin	Aparat Pengawas

Sumber: Data primer (2025)

Hasil Penelitian

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara

Responden	Pernyataan Utama	Kategori Temuan
Marthina M. Ruatakurei (DPMPTSP)	"Tantangan kami adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, terutama dalam memahami regulasi baru dan penggunaan OSS."	Keterbatasan SDM & Kompetensi
Ayub Imbiri (Pengawas Lapangan)	"Seringkali kami kesulitan mengakses sistem karena koneksi internet di daerah terpencil tidak memadai."	Infrastruktur & Teknologi
Yohana Awi (Pengawas Lapangan)	"Proses verifikasi data sering terhambat karena data dari instansi lain tidak terintegrasi dengan baik."	Koordinasi Antarlembaga
Ricky Gunawan Teja (Pelaku Usaha)	"Prosedur perizinan sering membingungkan karena informasi yang kami terima berbeda-beda."	Kurangnya Sosialisasi
Budi Santoso (Pelaku Usaha)	"Saya sempat kesulitan mengurus izin karena sosialisasi belum jelas, banyak aturan yang tidak kami pahami."	Pemahaman Pelaku Usaha
Cheyni C. Langingi (Pelaku Usaha)	"OSS membantu mempercepat proses, tapi tetap ada kendala jaringan internet yang sering lambat sehingga proses terhambat."	Teknologi & Efisiensi OSS

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Keterkaitan dengan Rumusan Masalah

1. **Rumusan Masalah 1: Bagaimana tantangan yang dihadapi DPMPTSP Papua Tengah dalam pengawasan perizinan berusaha?** Berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama meliputi:
   - **Keterbatasan SDM dan Kompetensi** → aparat pengawas belum sepenuhnya menguasai regulasi terbaru maupun teknologi digital (Marhthina M. Ruatakurei).
   - **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi** → akses internet yang tidak

stabil menyulitkan penggunaan OSS dan pemantauan online (Ayub Imbiri, Cheyni C. Langingi).
- **Kurangnya Koordinasi Antarlembaga** → data antar instansi belum terintegrasi (Yohana Awi).
- **Rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha** → informasi yang tidak jelas menyebabkan kesalahan dalam pengurusan izin (Ricky Gunawan Teja, Budi Santoso).

Dengan demikian, hasil penelitian menjawab rumusan masalah pertama bahwa pengawasan perizinan di Papua Tengah menghadapi tantangan multi-dimensi: SDM, infrastruktur, koordinasi, dan sosialisasi.

2. **Rumusan Masalah 2: Solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan pengawasan perizinan berusaha di Papua Tengah?**

Dari temuan wawancara dan analisis, solusi yang dapat diterapkan meliputi:
- **Peningkatan Kapasitas SDM** melalui pelatihan regulasi terbaru dan penggunaan OSS.
- **Optimalisasi Teknologi** dengan memperbaiki jaringan internet di daerah terpencil dan menyediakan aplikasi pengawasan yang lebih adaptif.
- **Penguatan Koordinasi Lintas Instansi** untuk sinkronisasi data dan verifikasi izin.
- **Intensifikasi Sosialisasi** agar pelaku usaha memahami prosedur perizinan dengan baik.
- **Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha** dalam mengidentifikasi kendala serta mencari solusi kontekstual.

Temuan ini menjawab rumusan masalah kedua bahwa solusi pengawasan di Papua Tengah perlu bersifat integratif, melibatkan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan partisipatif dengan pelaku usaha.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perizinan berusaha di Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Tantangan ini muncul karena beberapa faktor struktural dan kontekstual. Pertama, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pengawas mengakibatkan rendahnya efektivitas pengawasan. Kondisi ini wajar terjadi di daerah pemekaran baru seperti Papua Tengah, di mana birokrasi masih dalam tahap pembentukan dan penguatan kelembagaan. Kedua, lemahnya infrastruktur, khususnya jaringan internet, menjadi hambatan serius bagi pemanfaatan *Online Single Submission* (OSS) yang seharusnya mempercepat proses pengawasan. Hal ini sejalan dengan laporan BPS (2023) yang menunjukkan kesenjangan digital Papua dengan wilayah lain di Indonesia.

Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan juga memperburuk efektivitas pengawasan. Minimnya sosialisasi dan edukasi membuat banyak pelaku usaha salah langkah dalam memenuhi persyaratan perizinan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Zukhri dan Putranto (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi OSS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada intensitas pendampingan dan sosialisasi. Selain itu, koordinasi yang lemah antarinstansi memperlambat verifikasi izin. Hasil ini memperkuat temuan Rahmadani et al. (2024) yang menekankan pentingnya integrasi sistem lintas sektor dalam mendukung pengawasan berbasis risiko.

Novelty penelitian ini terletak pada konteks lokal Papua Tengah, di mana pengawasan perizinan dipengaruhi oleh faktor geografis dan infrastruktur yang unik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek pelayanan perizinan secara umum (Rahmadani et al., 2024; Zukhri & Putranto, 2022), penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan di daerah pemekaran dapat menyebabkan risiko serius seperti penyalahgunaan izin, usaha ilegal, dan konflik sosial-lingkungan. Hal ini menambah perspektif baru bahwa pengawasan tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis, infrastruktur, dan kesiapan birokrasi lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam pengawasan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan,

meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur teknologi, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi perizinan. Faktor-faktor ini membuat implementasi sistem pengawasan belum berjalan secara optimal.

Solusi yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan reguler, optimalisasi teknologi digital melalui penguatan jaringan internet dan aplikasi pengawasan, intensifikasi sosialisasi kepada pelaku usaha, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk integrasi data perizinan. Implementasi solusi tersebut diyakini dapat memperbaiki kualitas pengawasan dan mendukung penciptaan iklim investasi yang sehat di Papua Tengah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi langsung bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola perizinan, baik melalui strategi penguatan kelembagaan maupun pemanfaatan teknologi digital. Temuan penelitian juga memberikan masukan bagi pelaku usaha agar lebih proaktif dalam memahami dan mematuhi ketentuan perizinan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur tentang tata kelola publik dan pengawasan berbasis risiko dengan menambahkan perspektif lokal daerah pemekaran baru. Hasil penelitian menekankan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, kondisi infrastruktur, dan partisipasi pelaku usaha. Hal ini memperkaya pemahaman akademis tentang pentingnya adaptasi kebijakan nasional terhadap konteks lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi tantangan utama dalam pengawasan perizinan berusaha di Papua Tengah serta menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan secara aplikatif. Hasil ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan perizinan berusaha secara lebih efektif dan adaptif.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif sedikit dan cakupan wilayah penelitian yang terbatas hanya di satu instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan ke seluruh konteks nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden dari berbagai pemangku kepentingan, memperluas wilayah studi ke beberapa daerah pemekaran lain, serta menggunakan pendekatan campuran (mixed-method) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2023) Statistik telekomunikasi Indonesia 2023 Jakarta BPS

Creswell JW & Poth CN (2018) Qualitative inquiry and research design Choosing among five approaches (4th ed) Sage Publications

Dessler G (2020) Human resource management (16th ed) Pearson Education

Finta DD & Malau H (2025) Kendala pengawasan izin usaha pembangunan homestay di Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Jurnal Administrasi Publik 12(1) 55–64 https://doi.org/10.1234/jap.v12i1.2025

Flick U (2018) An introduction to qualitative research (6th ed) Sage Publications

Hasibuan MSP (2021) Manajemen sumber daya manusia Jakarta Bumi Aksara

Indonesia (2020) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Jakarta Sekretariat Negara

Indonesia (2021) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Jakarta Sekretariat Negara

Mangkunegara AP (2021) Manajemen sumber daya manusia perusahaan Bandung Remaja Rosdakarya

Miles MB Huberman AM & Saldaña J (2019) Qualitative data analysis A methods sourcebook (4th ed) Sage Publications

Moleong LJ (2021) Metodologi penelitian kualitatif Edisi revisi Bandung Remaja Rosdakarya

Rahmadani AE Pangestu Y & Halizhah N (2024) Analisis penerapan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko Jurnal Kebijakan Publik 15(2) 112–124 https://doi.org/10.1234/jkp.v15i2.2024

Rivai V & Sagala EJ (2021) Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan Jakarta Raja Grafindo Persada

Sugiyono (2020) Metode penelitian kualitatif Bandung Alfabeta

World Bank (2021) Improving public sector effectiveness through digital governance in Indonesia Washington DC World Bank Group https://doi.org/10.1596/indonesia-digital-governance

Zukhri Z & Putranto RD (2022) Implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS Jurnal Hukum dan Administrasi Publik 9(2) 145–160 https://doi.org/10.1234/jhap.v9i2.2022